BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional karena dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2016). Pajak, yang merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dibayar oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, digunakan untuk keperluan negara dan untuk kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting bagi kemajuan suatu negara, terutama untuk pertumbuhannya sendiri, karena pajak juga merupakan salah satu penerimaan negara paling besar, sekitar 70% (Ardiansyah, 2017). Pajak dialokasikan untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak dan rakyat yang membayar pajak (Lahengko, 2021). Oleh karena itu, penerimaan pajak memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang dibiayai oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, bertanggung jawab atas pengelolaan pajak di Indonesia. Disebabkan tuntutan untuk meningkatkan target penerimaan pajak setiap tahun, Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan, termasuk penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang potensial sambil mempertahankan asas keadilan

sosial dan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajak (Pratama, 2023). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengatur penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Namun, menurut Yulian (2019), realisasi penerimaan negara sebenarnya lebih rendah daripada anggaran yang dibuat. Ini terjadi setiap tahun. Salah satu contohnya adalah Provinsi Lampung, di mana dua tahun terakhir menurut data APBN pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp3.774.690.000,- dan pada tahun 2022 realisasinya sebanyak Rp4.864.240.000,- dari target penerimaan pajak sebesar Rp7.450.680.000,-. Ini menunjukkan rendahnya realisasi penerimaan pajak dari targetnya (Kemenkeu, 2022).

Kasus penggelapan pajak yang marak di Indonesia merugikan negara dan masyarakat. Kejaksaan Negeri (Kejari) Metro, Lampung menetapkan tiga tersangka dalam kasus penggelapan pajak penghasilan. Salah satunya merupakan mantan anggota DPRD Metro periode 2014-2019, Alizar alias Jinggo. Dua lainnya yaitu Sonny Febrian Kusuma selaku Direktur CV Karya Timur Perkasa (KTP), dan Karena selaku pihak ketiga yang diduga sebagai perantara pembayaran pajak penghasilan. Akibat ulah ketiganya, kerugian negara mencapai Rp130.000.000,- (Adi.H, 2023). Selain itu, berdasarkan sumber dari Media Komunitas Perpajakan Indonesia (Ortax, 2008) ada pula berita kasus dua aparat pajak (fiskus) terlibat kasus penggelapan pajak senilai Rp4.100.000.000,- di Provinsi Lampung.

Dari fenomena yang ada, kasus terjadinya penggelapan pajak yang dilakukan tentunya mengurangi rasa percaya masyarakat kepada oknum perpajakan maupun negara karena khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya timbulah persepsi di benak wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak.

Dengan pergeseran dalam dinamika ekonomi dan bisnis, penting untuk melihat bagaimana elemen seperti pendidikan, pengetahuan tentang pajak, dan lingkungan sekitar dapat memengaruhi cara mahasiswa akuntansi melihat dan menanggapi praktik penggelapan pajak. Selain itu, meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan kepatuhan perpajakan telah mendorong mahasiswa untuk lebih memahami dampak praktik penggelapan pajak terhadap stabilitas ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk persepsi mahasiswa akuntansi terhadap penggelapan pajak. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan metode pendidikan dan pelatihan yang lebih baik untuk membentuk sikap etis dan integritas profesi akuntansi di masa depan.

Studi sebelumnya, menurut penelitian Lahengko (2021) yang berjudul “analisis faktor-faktor persepsi mahasiswa mengenai etika atas penggelapan pajak”, menyatakan bahwa keadilan berpengaruh secara signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Yulian (2019) yang berjudul “persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak

(Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)”, menyimpulkan bahwa Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Penelitian Surahman dan Putra (2018) yang berjudul “faktor-faktor persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak”, menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Sedangkan hasil penelitian Yulian (2019) “persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia)”, menyatakan hasil penelitian pemahaman pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Dari hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan ketidakkonsistenan hasil pada kedua variabel tersebut maka penulis akan melakukan penelitian kembali terhadap variabel keadilan dan pemahaman pajak dengan menggunakan objek mahasiswa S1 akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP PENGELAPAN PAJAK (*TAX EVASION*) (Studi pada Mahasiswa Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gontiasari) “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak (*tax evasion*) ?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi atas penggelapan pajak (*tax evasion*) ?

C. Batasan Masalah

Objek penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiaras Bandar Lampung semester 4, 6, dan 8 yang telah menempuh mata kuliah akuntansi perpajakan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak. Hal ini dapat membantu mengembangkan teori-teori baru dalam bidang perilaku keuangan dan etika pajak, serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut

dalam mengidentifikasi strategi efektif untuk mencegah penggelapan pajak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan untuk merancang kurikulum yang lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai etika pajak kepada mahasiswa. Dengan demikian, diharapkan lulusan program akuntansi dapat menjadi profesional yang lebih bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengelola keuangan dan membayar pajak. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya kepatuhan pajak dan memotivasi mereka untuk menjadi agen perubahan yang mempromosikan kepatuhan pajak.